

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA
TRANSPARANSI DI KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh
ARFAN PRASETYA
105730430413



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Telp. (0411) 860132 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA TRANSPARAN DI KABUPATEN GOWA**

Nama Mahasiswa : Arfan Prasetya

No. Stambuk : 105730430413

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 9 februari 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2019

Menyetujui

Pembimbing I,

Drs. H. Hamzah Limpo, MS
NIDN: 0017075201

Pembimbing II,

Mira, SE, M.AK
NIDN: 0903038803

Mengetahui

Dekan,

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM: 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CFP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Telp. (0411) 860132 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ARFAN PRASETYA, NIM : 10530430413**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001 /2019M, Tanggal 04 Jumadil Akhir 1440H/09 februari 2019M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

04 Jumadil Akhir 1440 H

Makassar,

09 Februari 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H. Abd.Rahman Rahim,SE,MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE, MM (.....) (WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1.Dr.H.Andi Rustam,SE,MM.Ak.CA.CPA (.....)
2.Abd. Salam HB, SE. M.Si.AK.CA.CSP (.....)
3.Mukminati Ridwan, SE. M.Si (.....)
4.Drs.H. Hamzah Limpo.Ms (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E.,M.M
NBM: 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Telp. (0411) 860132 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfan Prasetya

Stambuk : 105730430413

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : "Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Di Era
Transparansi Di Kabupaten Gowa"

Dengan ini menyatakan bahwa:

"Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapa pun."

Damikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya berani menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2019

Yang membuat pernyataan



Arfan Prasetya

Diketahui oleh:



Dekan,

**Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078**

Ketua jurusan akuntansi

**Ismail Badottah, SE, M.Si, Ak.CA.CSP
NBM: 1073428**

ABSTRAK

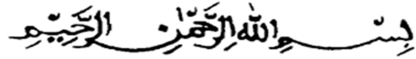
ARFAN PRASETYA. *Analisa Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Di Era Transparansi di Kabupaten Gowa.* Dibimbing oleh pembimbing I H. Hamzah Limpo dan Pembimbing II Mira

Penelitian ini untuk mengetahui kinerja rasio keuangan daerah di kabupaten gowa, apakah sudah transparansi terhadap laporan keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, Menurut Standar Akuntansi Keuangan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan tehnik mengumpulkan data Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa hasil analisis rasio keuangan daerah menggunakan Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi Keuangan daerah, rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan dan rasio Kemandirian keuangan daerah diperoleh bahwa keseluruhan rasio dalam kategori baik, dimana dinilai dari aspek transparansi.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio keuangan, Transparansi

KATA PENGANTAR



syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Khadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidaya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muahammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yanh berjudul “*Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah di Era Transparansi di Kabupaten Gowa*”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjan (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Maksasar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Muharuddin** dan ibu **Sukmawati** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih dan sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah di berikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa .penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula.penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Ismail Badollahi, S.E,M.Si,Ak.,CA., selaku Ketua Program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Drs.H.Hamzah Limpo, MS., selaku pembimbing I yang senangtiasa meluagkan waktunya membimbing dan Mengarahkan Penulis, Sehingga Skripsi selesai dengan baik
5. Ibu Mira, SE, M. Ak, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Skripsi hingga Ujian Skripsi
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan Ilmunya .kepada penulis selama mengikti kuliah.
7. segenap Staf dan Karyawan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Akuntansi angkatan 2013 dan terkhusus kelas AK.6¹³ yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak biasa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semnagat, kesabaran, motivasi, dan dukunganya sehingga penulis dapat merampungkan penulis Skripsi ini

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhamaddiyah Makassar.

Billahi fii sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 14 Januari 2019

Penulis

Arfan Prasetya

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	ix
Bab IPendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
Bab IITinjauan Pustaka.....	6
A. Laporan Keuangan.....	6
B. Bentuk Dan Susunan Laporan Keuangan	11
C. Pihak – Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan	14
D. Rasio - Rasio Keuangan Pemda	15
E. Syarat-Syarat Laporan Keuangan	22
F. Tujuan Akuntansi Dan Pemakai Laporan Keuangan.	24
G. Asumsi Dasar Akuntansi	25
H. Analisis Laporan Keuangan Tujuan, Dan Keterbatasannya.....	26
I. Penelitian Terdahulu	30
J. Kerangka Pikir.....	33
Bab IIIMetode Penelitian.....	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Definisi Operasional Variabel	35
D. Tehnik Pengumpulan Data	36
E. Tehnik Analisis Data	37
Bab IVGambaran Umum Objek Penelitian	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
Bab VHasil Penelitian Dan Pembahasan	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	55
Bab VI Kesimpulan dan Saran.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
Daftar Pustaka	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	17
Tabel	Kriteria Pengukuran Efektifitas.....	18
Tabel	Kriteria Pengukuran Efisiensi.....	19
Tabel	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	48
Tabel	Rasio Efektivitas.....	50
Tabel	Rasio Belanja Daerah.....	51
Tabel	Rasio Belanja Operasi.....	52
Tabel	Rasio Belanja Modal.....	53
Tabel	Rasio Pendapatan.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir	34
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Stelconi dalam Aliyah dan Nahar,2012)).

Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi.

keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian daerah. Padahal seperti yang kita ketahui penyelenggaraan pemerintahan serta akuntabilitas pemerintahan yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Kita ketahui bersama bahwa memang akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi, karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002, 21). Tahap-tahap dalam akuntabilitas laporan keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan atau penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan untuk itu laporan keuangan pemerintah harus disusun secara komprehensif (Mardiasmo, 2002, 36).

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik sering disebut *Good Governance*. *Good governance* menghendaki pemerintah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang

baik, seperti transparansi keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, serta sumber daya pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negara. Penerapan good governance tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Audit pada organisasi sektor publik tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 audit kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas. Alasan pentingnya dilakukan audit kinerja adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, selain itu audit kinerja juga sebagai alat evaluasi dan pengarah dalam pengalokasian sumber dana masyarakat, karena dengan dilakukannya audit kinerja akan terwujud pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah.

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan secara terpisah. Untuk itulah adanya audit kinerja pada organisasi pemerintah sangat

dibutuhkan karena selain dapat menilai akuntabilitas laporan keuangan, juga dapat menilai kinerja pegawai. Penilaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah.

Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah tetapi yang paling penting penyajian laporan keuangan pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas yang telah mencakup pembahasan secara tersirat serta terdapat pula fenomena-fenomena yang sedang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan akuntabilitas maupun standar akuntansi pemerintahan, maka judul penelitian ini adalah “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Era Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif.

B. Rumusan Masalah

Sebagai rumusan masalah yang diajukan pada penelitian yang akan diadakan adalah bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah di era transparansi di kabupaten gowa?

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menghitung rasio keuangan pemerintah kabupaten gowa
- b. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten gowa di era transparansi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai informasi kepada Pemda Kabupaten Gowa dalam melaksanakan roda pemerintahan yang lebih baik pada masa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan acuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang laporan keuangan kabupaten gowa.
- c. Sebagai bahan pustaka bagi peneliti berikutnya, utamanya peneliti yang ingin mengetahui tentang keuangan daerah umumnya, khususnya kabupaten gowa.

BAB I TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2015:1), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara umum laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan keuangan menurut para ahli sebagai bahan rujukan landasan teori / kajian pustaka karya ilmiah atau karya tulis;

Definisi Laporan Keuangan Menurut Birgham dan Houston, laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas yang berisi tulisan angka-angka namun sangat penting juga untuk memikirkan aset nyatanya yang berada di balik angka tersebut. (Birgham dan Houston, 2010)

Pengertian Laporan Keuangan Menurut Subramanyam (2010:19), Laporan Keuangan ialah produk akhir dari sebuah pelaporan transaksi keuangan yang penyusunannya diatur oleh standar atau aturan ilmu akuntansi, insentif manager, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. (Subramanyam (2010:19). Pengetahuan dan pemahaman lingkungan pelaporan keuangan yang

baik sangat mendukung dalam penyampaian informasi posisi keuangan perusahaan sesungguhnya agar dicapai kinerja perusahaan yang lebih baik.

Arti Laporan Keuangan Menurut Irham Fahmi, Laporan Keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi perusahaan dalam hal keuangan dalam periode tertentu yang mana informasi tersebut sebagai acuan tentang kinerja perusahaan.

2. Pengertian Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Pada saat ini terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. Perubahan itu sangat mempengaruhi posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berikut ini pengertian-pengertian dari istilah akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas.

Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting* dalam Sofyan Syafri Harahap (2003: 4) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Sedangkan pengertian dari transparansi dan akuntabilitas yang diambil dari kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP, 2005).

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP, 2005).

Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

3. Pengertian Partisipatif

Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipatif merupakan pinjaman dari bahasa Belanda "participatie" atau dari bahasa Inggris "Participation" (Sukanto, 1983). Dalam bahasa Latin disebut "Participatio" yang berasal dari kata kerja "Partipare" yang berarti ikut serta, sehingga partisipatif

mengandung pengertian aktif yaitu adanya kegiatan atau aktivitas. Menurut Davis dan Newstrom (2004:) Partisipatif adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.

Menurut Sajogyo (artikel :2002). Partisipatif adalah suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa “pembangunan”, termasuk mengambil keputusan atas sumberdaya.

Menurut Rauf, Nasution dalam Sri Yuliyati, mengemukakan partisipatif terhadap koperasi adalah manifestasi dari perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam menunjukkan sikap dan mewujudkan peranannya terhadap koperasi guna meningkatkan kesejahteraanya. Menurut (Sastropetro:1995,11).Partisipatif adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata.(artikel Dr. Arifin Sitio)Secara umum, partisipasi dapat di artikan sebagai keterlibatan diri seseorang dalam suatu kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau suatu proses identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam kegiatan bersama dalam situasi sosial tertentu.

4. Indikator – Indikator Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif

Makna dari transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Agus Dwiyanto (2006:80) mengungkapkan 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas dan partisipatif penyelenggaraan pemerintahan:

- 1) Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
- 2) Merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
- 3) Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely and readily available).

Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a) Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan

Adapun bentuk dan susunan laporan keuangan

1. Neraca

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Neraca menunjukkan seberapa besar kekayaan perusahaan. Neraca mempunyai 2 bentuk yaitu :

a) Neraca Bentuk Staffel

Neraca bentuk staffel adalah bentuk neraca yang di susun kebawah baik aktiva maupun passivanya (hutang + modal) pada bagian atas untuk mencatat aktiva dan bagian bawah untuk mencatat hutang dan modal.

b) Neraca Bentuk Scontro

Neraca bentuk scontro adalah neraca yang posisi aktiva dan pasiva (hutang + modal) sebelah menyebelah. Untuk aktiva pada sisi kiri pasiva (hutang + modal) di sisi kanan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun sistematis, isinya penghasilan yang diperoleh perusahaan dikurangi dengan beban-beban yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan rugi laba menjabarkan elemen-elemen penghasilan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi). Untuk perusahaan jasa istilah penghasilan dalam laporan laba rugi adalah pendapatan. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur istilah penghasilan dalam laporan keuangan adalah penjualan. Laporan laba rugi disajikan dalam 2 bentuk yaitu:

a) Bentuk *Single Step*

Didalam laporan Laba/Rugi bentuk *Single step*, untuk akun penghasilan dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan. Kemudian dibagian bawah pendapatan baru beban dikelompokkan tersendiri dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Selisih merupakan laba bersih atau rugi bersih.

b) Bentuk *Multiple Step*

Bentuk *Multiple step* untuk pendapatan harus dipisahkan antara pendapatan pokok dengan pendapatan luar usaha pokok, serta memisahkan beban usaha utama dengan beban di luar usaha.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas/modal adalah laporan yang berisi seberapa banyak modal awal telah bertambah ataupun berkurang selama periode tertentu. Perubahan modal itu terjadi dapat karena adanya laba

atau rugi usaha, pengambialan pribadi dari pemilik atau *prive*, maupun penambahan modal pemilik.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas berisi kas dan setara kas yang masuk dan keluar perusahaan pada periode tertentu. Yang disebut kas adalah uang tunai, sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan cepat dapat dijadikan kas. laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan di klasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Adapun bentuk laporan arus kas yaitu:

a) Metode langsung (*Direct Method*)

Penggunaan metode langsung merefleksikan setiap item dari laporan laba rugi laba akrual basis menjadi pendapatan atau beban kas basis tanpa perlu melihat laporan laba rugi. Pada laporan keuangan sekarang ini perusahaan yang *go public* mulai tahun 2002 wajib membuat Laporan Arus Kas dengan metode langsung (*direct method*).

b) Metode Tidak Langsung

Pada metode ini langkah awal dimulai dari laba bersih. Perbedaan pada laporan arus kas metode langsung terletak pada aktivitas operasi. Langkah – langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah merubah laba bersih menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Karena metode ini dimulai dari laba bersih, maka terdapat penyesuaian terhadap laba bersihnya yaitu dengan menambahkan pos – pos yang bukan merupakan beban kas (*Depresiasi, Amortisasi, dan lain – lain*).

Dengan adanya Laporan Arus Kas, maka diharapkan dapat:

- a. Mengetahui arus kas yang actual.
- b. Membantu mengenal hubungan antara arus kas dengan laba secara akuntansi.
- c. Melihat likuiditas itu sendiri.
- d. Melihat informasi mengenai kualitas dari laba yang dihasilkan perusahaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan.

C. Pihak – Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan

Pada awalnya perusahaan membutuhkan laporan keuangan sebagai alat uji kebenaran keuangan yang masuk dan keluar perusahaan, namun dalam perkembangannya, laporan keuangan tidak sekedar sebagai alat uji kebenaran saja tetapi juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana berdasarkan laporan keuangan yang sudah dianalisa, kemudian digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yaitu pihak internal dan pihak eksternal.

1. Pihak Internal meliputi;

- a) Pihak Manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian (*controlling*), pengoordinasian (*coordinating*) dan perencanaan (*planning*) suatu perusahaan.
- b) Pemilik perusahaan, dengan menganalisis laporan keuangannya pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.

2. Pihak Eksternal meliputi;

- a) Investor, memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil (return) dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut
- b) Kreditur, merasa berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek (likuiditas), dan profitabilitas dari perusahaan
- c) Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti Statistik.
- d) Karyawan, berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan.

D. Rasio - Rasio Keuangan Pemda

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan

alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kiadah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Abdul Halim (2012: 4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Ada beberapacara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi

Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah sekali	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber :AuliaZhufinsaNur Rahmatina,2013

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

- b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2. Kriteria pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
(x>100%)	Efektif
(x=100%)	Efektivitas berimbang
(x<100%)	Tidak efektif

Sumber :Mahmudi, 2013

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013 hal. 112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3. Kriteria pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% katas	Tidak efisien
100%	Efisien berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber :Mohammad Mahsun (2014:187)

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012 hal.236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- a. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Menurut Mahmudi (2010 hal.164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

- b. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2010 hal. 164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaandimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2008 hal. 241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

E. Syarat-syarat Laporan Keuangan

Syarat-syarat laporan keuangan merupakan cirikhas membuat informasi dalam laporan kegunaan yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan bernilai ekonomis. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam membuat laporan keuangan :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi

pemakai dengan membatu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan. Selain itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. Dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu maka ketidakpastiaan tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dan tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat. Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialistis dan biaya (kelengkapan). Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan dapat mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan.

4. Dapat dibandingkan

Pemakaian laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Pemakaian juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara relatif. Oleh kerna itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode yang sama, dan untuk perusahaan yang berbeda.

5. Mempunyai daya uji. Laporan keuangan yang telah disusun dengan panduan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah disyahkan, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain.

6. Netral

Laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu.

a. Tepat waktu artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu

b. Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas dan tidak menyesatkan pembaca.

F. Tujuan Akuntansi dan pemakai laporan keuangan.

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan diantaranya adalah :

- a. Pihak manajemen perusahaan dimana laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
- b. Pemilik perusahaan, fungsi laporan keuangan digunakan untuk memberi tahu keadaan perusahaan dari sisi keuangan.
- c. Investor & pemegang saham, disini investor biasanya melihat laporan keuangan untuk mengambil keputusan penanaman saham
- d. Kreditor atau pemberi hutang biasanya melihat kesehatan perusahaan dari laporan keuangan untuk memutuskan perusahaan layak diberikan kredit atau tidak.
- e. Pemerintah, berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang ada.

- f. Karyawan, memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat mereka bekerja.

G. Asumsi Dasar Akuntansi

Akuntansi dalam prakteknya berjalan berdasarkan asumsi-asumsi, dimaksudkan agar dapat lebih mudah diterima atau dilakukan. Adapun asumsi-asumsi dasar yang dipakai dalam dunia akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan usaha khusus

Perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, berpisah dengan kekayaan pemilik usaha artinya perusahaan itu dimiliki oleh pemilik, namun harus dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.

2. Kelangsungan usaha

Perusahaan diharapkan akan terus hidup dan berkembang, tidak terlikuidasi di masa yang akan datang. Penekanan dari konsep ini adalah terhadap anggapan bahwa akan tersedia cukup waktu bagi suatu perusahaan untuk menyelesaikan usaha, kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian.

3. Penggunaan satuan moneter

Transaksi yang digunakan dalam pencacatan akuntansi dinyatakan di dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi itu. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara di mana perusahaan itu berdiri. Contohnya : indonesia unit moneternya Rupiah, malaysia unit moneternya ringgit.

4. Periode waktu pelaporan

Batas waktu yang diberikan untuk melaporkan laporan keuangan setidaknya-tidaknya satu tahun sekali laporan keuangan harus disajikan.

H. Analisis Laporan Keuangan Tujuan, dan Keterbatasannya

Menurut Jumingan (2011). Analisis rasio keuangan yaitu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Secara individual rasio itu kecil artinya kecuali jika dibandingkan dengan suatu rasio standar yang layak dijadikan dasar pembandingan. Apabilah tidak ada standar yang di pakai sebagai pembandingan dari penafsiran rasio-rasio dari perusahaan itu menunjukkan kondisi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan

Menurut Harapan (2008), juga menjelaskan bahwa angka yang didapatkan dalam analisis rasio keuangan adalah hasil dari satu laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan tersebut dapat ternilai secara cepat.

Analisa laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengavaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan, adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan mengestimasi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisa laporan keuangan juga dapat melihat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke tahun.

Analisis laporan keuangan ini jika dilakukan akan bermanfaat untuk banyak pihak diantaranya :

1. Bagi pihak manajemen. Untuk mengevaluasi kinerja perusahaan masa lalu, saat ini untuk tujuan pemberian kompensasi dan pengembangan usaha.

Untuk mengetahui kinerja yang dicapai oleh manajemen, selanjutnya analisis laporan keuangan juga di gunakan dalam pengambilan keputusan, menganalisis usaha yang sedang berjalan, dapat juga digunakan untuk membuat anggaran masa mendatang dan kontrol internal.

2. Bagi pemegang saham/ investor. Untuk mengetahui kinerja perusahaan berkaitan dengan investor yang telah dilakukan di perusahaan berikut resiko-resikonya.
3. Bagi kreditor. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam rangka hal pembayaran pinjaman.
4. Bagi pemerintah. Apabila perusahaan ingin masuk dalam perusahaan *go public* maka analisis laporan keuangan digunakan sebagai persetujuan untuk masuk perusahaan *go public*. Analisis laporan keuangan juga di gunakan oleh pemerintah untuk kepentingan mengetahui kemampuan perusahaan dalam pemungutan pajak.
5. Bagi karyawan. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan kompensasi kerja, menjamin kualitas hidup dan kesejahteraan karyawan, menyediakan kesempatan bekerja dan berkarir untuk jangka waktu yang lama.
6. Supplier. Pihak supplier dan pemberi pinjaman jangka pendek lainnya analisis laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya, sehingga supplier dapat menentukan jumlah piutang yang di berikan dan jangka waktunya.
7. Pelanggan. Pelanggan menggunakan analisis laporan keuangan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan, terutama informasi analisis

laporan keuangam digunakan oleh pelanggan yang melakukan kerjasama jangka panjang.

Menurut Harapan (2008) tujuan analisis laporan keuangan antara lain :

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari pada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (*implicit*).
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungan dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya yang dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat dilapangan seperti untuk prediksi, peningkatan (*rating*).
6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksud dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga.
7. Dapat menentukan peringkat perusahaan menurut kriteria tertentu yang suda dikenal dalam dunia bisnis.
8. Dapat membandingkan dituasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan priode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, hasil usaha, stuktur keuangan dan sebagainya.

10. Bisa juga memprediksikan potensi apa yang mungkin di alami perusahaan dimasa yang akan datang.

Menurut kasmir, (2011) bahwa tujuan analisis laporan keuangan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu priode tertentu, baik aset, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah di capai untuk beberapa priode tertentu.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui langka-langka perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
4. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyegaran atau tidak.
5. Untuk digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Hanafi (2009) mengutarakan bahwa meskipun analisis laporan keuangan sangatbermanfaa, tetapi ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Data yang mencatat dan dilaporkan oleh laporan keuangan mendasarkan pada harga perolehan.
2. Upaya perbaikan barangkali bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk memperbaiki laporan keuangan sehingga laporan keuangan tampak bagus.

I. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Penelitian ini menganalisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.
2	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Penelitian ini menganalisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011).
3.	Kontandengan (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Ditinjau dari Rentabilitas, Likuiditas	Analisis Deskriptif	tingkat kinerja PT. Setia Tri Jujur Bersama Manado di tahun 2008 adalah baik sedangkan pada tahun 2009 adalah cukup baik dan tahun 2010 adalah sangat baik.

		dan Solvabilitas pada PT Setia Tri Jujur Bersama Manado. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deskriptif		
4.	Meycih (2014)	Analisa Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Melalui Penilaian Tingkat Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Dan Profitabilitas Pada PT. Kalbe.	Analisis deskriptif kualitatif komparatif.	yaitu berdasarkan hasil analisis laporan keuangan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik.
5.	Handayani (2014)	Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan industri tekstil yang terdaftar dibursa efek.	Analisa Deskriptif	menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan industri tekstil yang terdaftar di BEI secara keseluruhan pada tahun 2006, kinerja keuangan perusahaan yang dinilai paling baik adalah PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Untuk tahun 2007 dan 2008 yang memiliki kinerja paling baik adalah PT. Polychem Indonesia Tbk.

6.	Andreas(2014)	Analisis laporan keuangan untuk mengukur nerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten kediri	Analisis rasio ke mandirian, efektivitas, debt service coverage ratio (DSCR) dan rasio pertumbuhan pendapatan	adanya kecenderungan mengalami penurunan apabila ditinjau dari rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan rasio pertumbuhan pendapatan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang kurang baik pada rasio-rasio tersebut. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi menunjukkan kinerja yang baik
7.	Yanti (2013)	Analisis laporan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah daerah kota banjarmasin	metode Rasio tingkat ketergantungan terhadap arus kas, rasio keuangan efisiensi.	Kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2004 kurang bagus jika dibandingkan dengan tahun 2003. Kenaikan kas bersih dari seluruh aktivitas mengalami penurunan pada tahun 2004. Dari analisis tingkat kecukupan modal dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dikatakan cukup bagus dengan tingkat efisiensi dapat diberikan penilaian kurang bagus. Berdasarkan hasil analisis efisiensi hasil pengembalian arus kas atas aktiva menunjukkan kinerja yang kurang bagus dan hasil analisis tingkat likuiditas dapat diketahui adanya peningkatan setiap tahunnya.
8.	Heri Triyono (2013)	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011	Penelitian menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektivitas yang dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang

				positif. Rasio derajat desentralisasi rendah.
9.	Wakhyu di (2013)	Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah	Penelitian ini menganalisis Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor didalam mengelola keuangan daerahnya sendiri masih rendah. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa hambatan yaitu: Penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD hingga Perda Laporan Realisasi APBD setiap tahunnya belum tepat waktu dan penganggarannya belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
10.	Elvira Zeyn (2013)	Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Penelitian ini menganalisis pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan	Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penerapan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, kemudian standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

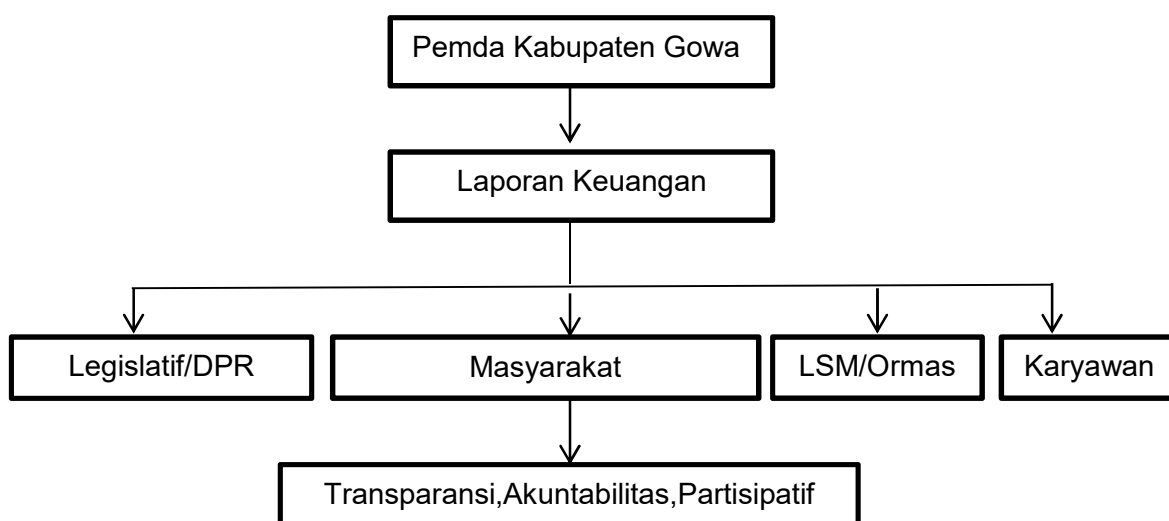
J. Kerangka Pikir

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2. 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau masalah atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang di teliti (Kountur,2004)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengumpulan data dan informasi sebagai penunjang utama dalam proposal ini, maka penulis memilih objek penelitian bertempat di Pemerintah Kabupaten Gowayang direncanakan dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan yakni pada bulan Maret-Mei 2018.

C. Definisi Operasional Variabel

Mendefinisikan variable secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

1. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau informasi pemerintahan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : Neraca,laporan laba rugi,laporan perubahan ekuitas,laporan arus kas,catatan atas laporan keuangan.

2. Transparansi laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan
3. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban
4. Partisipatif adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggungjawab bersama.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh informasi data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar landasan bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, maka penulis memperoleh beberapa cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Upaya ini dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari dan mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini.

Data tersebut dapat diperoleh melalui literatur-literatur, buku-buku referensi dan lain-lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan tanya jawab kepada pimpinan dan staff atau pihak-pihak lain yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bidang-bidang permasalahan yang akan dibahas oleh penulis untuk memperoleh informasi yang bermutu dan dapat dipercaya. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang berupa gambar maupun dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

E. Tehnik Analisis Data

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa tahun 2016 sampai tahun 2017.
2. Menghitung rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan tahun } (t-1)} \times 100\%$$

3. Menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan mengukur rasio rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.
4. Menganalisis dan membahas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menarik kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Gowa, dan gambaran umum mengenai Pemerintah Kabupaten Gowa. Gambaran umum Kabupaten Gowa mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten Gowa. Sedangkan gambaran Pemerintah Kabupaten Gowa meliputi uraian tugas, fungsi dan tata kerja serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa.

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah

Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar 695.697 jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

b. Kondisi Demografi

Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk Kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%. Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng

Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong,

Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut.

Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

2. Visi dan Misi Kabupaten Gowa

a. Visi

“Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai.
- 2) Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan ekonomi.
- 3) Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.

- 4) Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tatapemerintahan yang baik
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestariaan lingkungan.

3. Gambaran Umum Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa

a. Uraian Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008, serta Peraturan Bupati Gowa Nomor : 39 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efisien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam Perencanaan, Pengolahan, Penagihan, Penelitian, Pembukuan, Penyuluhan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dinas;
- b) Penyusunan rencana strategik dinas;

- c) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 07 Tahun 2008 Tanggal 28 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Gowa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas:

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat :

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris dibantu oleh tiga sub bagian terdiri dari:

(1) Sub. Bagian Umum & Kepegawaian

(2) Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan

(3) Sub. Bagian Keuangan

3) Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

(1) Seksi Penetapan PAD

(2) Seksi Pajak Daerah

(3) Seksi Retribusi Daerah

4) Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah :

(1) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

(2) Seksi Pendataan dan Penyuluhan

(3) Seksi Penerimaan dan Penagihan

5) Bidang Akuntansi :

(1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

(2) Seksi Akuntansi Aset

(3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan

6) Bidang Anggaran :

(1) Seksi Penyusunan APBD

(2) Seksi Otoritas DPA – SKPD

(3) Seksi Perbendaharaan

7) Bidang Aset Daerah :

(1) Seksi Perencanaan Kebutuhan

(2) Seksi Analisa Aset

(3) Seksi Penghapusan Aset

8) Kelompok Jabatan Fungsional

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD

Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut ini rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten gowa di sajikan dalam bentuk tabel Kemandirian rasio keuangan daerah

Ket : Tabel 5.1 Rasio kemandirian keuangan daerah

Tahun	Anggaran PAD	Total Pendapatan	Rasio (%)	Ket
2016	187.176	1.612.246	11,60	Instruktif
2017	268.339	1.790.263	14,98	Instruktif
Jumlah	455.515	3.402.509	26,60	Konsultatif

Sumber : Pemda kabupaten gowa (2016/2017)

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2016 menunjukkan jika daerah mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan masyarakat serta kontribusi sebagai pendapat sebesar 11,60%. Dimana hal tersebut jika dikaitkan dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka di tahun 2016 kemandirian daerah berada pada interval 0%-25% dengan kemampuan daerah yang sangat rendah dan pola hubungan yang Instruktif.

Selanjutnya tahun 2017, rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 14,98%. Dimana hal tersebut jika dikaitkan dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka di tahun 2017 kemandirian daerah masih berada pada interval 0%-25% dengan kemampuan daerah yang sangat rendah dan pola hubungan yang Instruktif. Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Penyebab terjadinya pola hubungan instruktif keuangan daerah di kabupaten gowa karena

dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian tahun 2016 dan tahun 2017 berada pada kategori pola hubungan instruktif, yang menunjukkan peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. Dengan kata lain daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah sepenuhnya. Maka dalam hal ini tingkat partisipatif belum tercapai, yaitu pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Gowa berdasarkan pada hasil analisis laporan keuangan pada aspek rasio kemandirian Kabupaten Gowa berada pada kategori 0-25% saja yang berarti bahwa pola hubungan instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan jika tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah rendah, sehingga hal ini akan ikut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain maka dari aspek partisipatif laporan keuangan pemerintah kabupaten gowa kurang partisipatif. Kurangnya partisipatif secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi kinerja aparat keuangan pemerintah Kabupaten Gowa.

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut ini rasio efektivitas pemerintah kabupaten gowa di sajikan dalam bentuk tabel Rasio efektivitas

Ket : tabel 5.2 Rasio efektivitas

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio (%)	Ket
2016	1.612.246	1.714.540	94,03	Efektif
2017	1.790.263	1.773.971	100,92	Efektivitas berimbang
Jumlah	3.402.509	3.488.511	194,95	Efektivitas berimbang

Sumber : Pemda kabupaten gowa (2016/2017)

Berdasarkan pada tabel pengukuran efektivitas tahun 2016 menunjukkan kemampuan daerah efektif. Sedangkan tahun 2017 menunjukkan kemampuan daerah efektif berimbang. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah kabupaten gowa di sajikan dalam bentuk tabel

Ket : Tabel 5.3 Rasio efisiensi keuangan daerah

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Ket
2016	1.432.497	1.612.246	88.85	Efisien
2017	1.539.478	1.790.263	85.99	Efisien

Sumber : Pemda kabupaten gowa (2016/2017)

Efisiensi pengukuran kinerja keuangan PEMDA Kabupaten Gowa tahun 2016 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan daerah efisien, yakni rasio efisiensi keuangan daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal.

a. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Ket : Tabel 5.4 Rasio belanja Operasi

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Rasio (%)
2016	1.090.021	1.432.497	76,09
2017	1.061.584	1.539.478	68,95
Jumlah	2.151.605	2.971.975	145,05

Sumber : Pemda kabupaten gowa (2016/2017)

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2016 yaitu sebesar 76.09% dan tahun 2017 sebesar 68.95%, hal ini tergolong masih rendah dimana rasio belanja daerah belum mendominasi, padahal dibutuhkan total belanja daerah yang cukup besar untuk menyokong pembangunan daerah.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

b. Rasio Belanja Modal

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2010 hal. 164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Ket : Tabel 5.5 Rasio belanja modal

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio (%)
2016	342.475	1.432.497	23,91
2017	477.894	1.239.478	38,56
Jumlah	820.369	2.671.975	62,46

Sumber : Pemda kabupaten gowa (2016/2017)

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

$$r_{2016} = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

$$r = \frac{1.612.246.983.358.60 - 1.450.811.765.394.00}{1.450.811.765.394.00} \times 100\%$$

$$r_{2016} = 11.12\%$$

$$r_{2017} = \frac{1.790.263.499.730.15 - 1.612.246.983.358.60}{1.612.246.983.358.60} \times 100\%$$

$$r_{2017} = 11.04\%$$

Berikut ini Rasio pertumbuhan kabupaten Gowa di sajikan dalam bentuk tabel

Ket : Tabel 5.6 Rasio pertumbuhan

Tahun	Pendapatan	Pendapatan(t-1)	Rasio(%)
2016	1.612.246	1.450.811	11.12
2017	1.790.263	1.612.246	11.04

Sumber : Pemda kabupaten gowa (2016/2017)

Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa rasio pertumbuhan keuangan pemerintah Kabupaten Gowa tahun 2016 sebesar 11.12% tumbuh secara positif, meskipun diperoleh bahwa rasio belanja daerah yang ukup besar lebih dari 50%. Demikian pula halnya dengan tahun 2017, rasio pertumbuhan sebesar 11.04% pada arah pertumbuhan positif. Untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa hasil analisis rasio keuangan daerah menggunakan Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi Keuangan daerah, rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan dan rasio Kemandirian keuangan daerah diperoleh bahwa keseluruhan rasio dalam kategori baik, dimana dinilai dari aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Selain itu, Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sukhemi (2011), bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan transparansi laporan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengungkapan laporan keuangan mengenai informasi tentang pos-pos laporan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam memenuhi hak publik.

Sedangkan pada aspek akuntabilitas yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai pelaksana good governance telah memberikan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat dalam menyediakan informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi untuk Performance dan akuntabilitas

pemerintahan termasuk akuntabilitas keuangan. Penggunaan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas laporan keuangan dan dapat melihat kinerja aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan mewujudkan good governance, maka selain standar tersebut analisis kondisi keuangan baik Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi Keuangan daerah, rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan dan rasio Kemandirian keuangan daerah ikut diperhitungkan dalam melihat akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (pricipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gowa jika dilihat dari kinerja keuangan yang meliputi rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian. Rasio Keserasian adalah sudah stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk belanja modal berada pada kisaran sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengalami kemajuan dan memperhatikan pembangunan.

B. Saran

Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan untuk mengantisipasi terjadinya dalam pemungutan atau penerimaan potensi belanja operasional dan belanja modal. Serta mencari alternative-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gowa untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru melalui program kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta.
- Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. (2011). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009. Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung.
- Dedi Nordiawan. (2007). Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.
- Heri Triyono. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indra Bastian. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
- Joko Pramono. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Vol.7 No.13, Juli 2014
- Listiyani Natalia. (2015). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan: Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.
- Moh. Nazir. (2009). Metode Penelitian. Ghali Indonesia : Jakarta.
- Mulyadi. (2007). Sistem Akuntansi. Salemba Empat: Jakarta.
- Nirzawan. (2011). Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. UPP YKPN: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan: Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015: Jakarta.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung

Wakhyudi. (2013). Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Rasio Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 1 No. 2, 2013